

**DPD REI RIAU DAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU DALAM  
MENGEMBANGKAN PERUMAHAN RAKYAT  
(2011-2013)**

**Oleh:**

**Junizan**

Email: junizan@yahoo.com

**Pembimbing: Drs. H. Muhammad Ridwan<sup>1</sup>**

Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau

Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru, 28293

Bibliografi: 10 Buku (tahun 2004 - tahun 2012) 4 Jurnal, 1 Undang-undang, 5 Tabloid  
realestat, 3 website

***Abstract***

*The Rule and Regulation of Indonesia year 1945 verse 28-H has been mandated that housing and resident are the base of human right where everyone has right to live prosperous physically and mentally, stay and get life in well environment and healthy. This base principle has been accommodated too in the Rule and Regulation No. 39 year 1999 about human right as well as in the Rule and Regulation No. 1 year 2011 about housing resident area. Therefore, to guarantee the fulfillment that human right it has become obligation for the government as state organizer to respect, save and also fulfill it directly. In concretizing this mandate of our Rule and Regulation, the government needs help from other side, that is developer. This developer here is Real Estate Indonesia (REI) is the association of developers in Indonesia. REI is believed becomes the stakeholders of the government in concretizing this mandate of our Rule and Regulation to prepare housings for Indonesian societies.*

*This research has been done in Pekanbaru where the location was in DPD REI Riau Province. This research was qualitative research in which the informations were taken by deep interviews from some interviewers.*

*The result of this research showed that the growth of the Riau economic development that made the need of housings in this area was growing fast too. As a result, this impacted to the resident bussiness in Riau Province that becomes brighter and gives prospect. Riau province is one of the provinces in Indonesia that experiences fast economic development in Sumatra. In every year almost 10.000 residents built in Riau Province with majority in Pekanbaru. Nowadays, Riau is in the first position in this growth of the residents expansion in Sumatra. While in Indonesia, Riau Province is in the third position.*

***Key words:*** DPD REI Riau, Housing, subsidy, government policy.

---

<sup>1</sup>Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Riau

## 1. Pendahuluan

Penelitian ini merupakan penelitian eksplanatif tentang pembangunan perumahan rakyat di Kota Pekanbaru, dimana dalam pembangunan ini pemerintah dan swasta (DPD REI RIAU) saling bekerjasama.

Rumah termasuk dalam kebutuhan primer manusia. Sebagai kota yang terus berkembang pesat, pekanbaru juga menghadapi masalah lonjakan penduduk dan lonjakan akan permintaan perumahan. Hal ini kemudian melandasi pemerintah untuk senantiasa mengupayakan penyediaan perumahan bagi golongan masyarakat menengah kebawah yang dikenal dengan KPR (Kredit Perumahan Rakyat). Melalui program ini pemerintah berusaha melakukan upaya mensejahterakan rakyat dalam bidang perumahan. Cita-cita ideal dari pembangunan ini adalah menciptakan masyarakat Riau yang sejahtera dan menghapus tuna wisma.

Perumahan rakyat dalam kategori ini adalah perumahan sederhana tapak atau biasa disebut dengan perumahan tipe 36.

Hal ini berdampak pada bisnis perumahan di Riau semakin cerah dan menjanjikan. Riau adalah salah satu provinsi yang mengalami perkembangan ekonomi sangat pesat di Sumatera. Bahkan Pekanbaru telah menyaingi Medan dan jauh meninggalkan Padang yang sebelumnya berkembang pesat. Dengan perkembangan ini, membuat sektor perumahan juga berkembang pesat. Setiap tahunnya hampir 10.000 rumah baru berdiri di Riau dengan mayoritas di Pekanbaru. Bahkan sekarang sudah menjalar ke kabupaten dan perbatasan Pekanbaru.

Mitra-mitradari REI adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN), pemerintah daerah, dan perbankan<sup>2</sup>. Real Estate Indonesia (REI) mendukung

Perumahan tipe 36 merupakan tipe rumah yang mendapat subsidi dari pemerintah melalui program FLPP. Pemerintah melalui Kemenpera memberikan aturan-aturan kemudahan kredit rumah bagi rakyat miskin melalui skema FLPP.

Di pekanbaru program FLPP ini mendapat apresiasi yang sangat baik karena Pekanbaru masih memiliki sasaran pembangunan meskipun kini hanya pada kisaran wilayah penyangga saja, seperti Rumbai dan Tenayan Raya. Animo masyarakat Pekanbaru masih tinggi untuk memiliki rumah. Seiring dengan dijadikannya Pekanbaru sebagai pusat pendidikan, perdagangan, bisnis, serta sarana dan prasarana yang lebih lengkap sebagai ibu kota provinsi, iklim investasi di Pekanbaru semakin membaik.

## 2. Pembahasan

### A. Pengembangan Perumahan Rakyat di Kota Pekanbaru

Pesatnya perkembangan perekonomian Riau menyebabkan kebutuhan rumah di daerah ini juga terus mengalami peningkatan.

program pemerintah dalam membangun Riau kedepannya dalam sector perumahan dan menjadikan Riau sebagai etalase Indonesia bagian barat. Riau merupakan kawasan yang sangat strategis. Karena bersebelahan dengan Malaysia dan Singapura. Dan pertumbuhan ekonomi di Riau sangat pesat. Perkembangan ini juga tidak lepas dari tren naiknya harga tanah dari tahun ke tahun. Tiga wilayah favorit sebelumnya seperti Panam, tanah mulai naik.

Lahan adalah salah satu sub-faktor teknis dalam Real Estate, RS, RSS, yang bekerjanya tidak dapat dilepaskan dengan sub-sub factor lainnya dalam agrarian untuk mencapai tujuan. Badan Pertanahan Nasional RI, Kebijakan pemanfaatan lahan adalah bagian dari kebijakan pertanahan, yang dapat berupa prinsip-prinsip, norma-

---

<sup>2</sup><http://www.konsumenproperti.com/umum/2012-rei-target-500-rumah-murah-html>.

norma, pedoman-pedoman mengenai pertanahan yang dituangkan kedalam peraturan-perundangan dan/atau keputusan-keputusan aparat pemerintah. Kebijakan pemanfaatan lahan untuk Real Estate, RS, RSS salah satu factor menunjang kesejahteraan manusia.

Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) mengapresiasi upaya yang dilakukan Real Estate Indonesia (REI) dalam mengatasi permasalahan penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan menengah kebawah di Propinsi Riau dan Kepulauan Riau. Melalui pertemuan-pertemuan forum antara pemerintah (Kemenpera) dan pengurus-pengurus REI akan menghasilkan terobosan pembangunan yang lebih baik lagi karena melalui forum ini dapat dievaluasi kinerjajasa sosiassi, dirumuskan penyelesaian masalah yang terjadi sekaligus ditentukan langkah-langkah strategi suntuik mewujudkan pembangunan perumahan yang lebih baik.

### **1. Peran Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman**

Amanat UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Pemerintah perlu lebih berperan dalam menyediakan dan memberikan kemudahan dan bantuan perumahan dankawasan permukiman bagimasyarakat melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang berbasis kawasan serta keswadayaan masyarakat sehingga merupakan satu kesatuan fungsional dalam wujud tata ruang fisik, kehidupan ekonomi, dan sosial budaya yang mampu menjamin kelestarian lingkungan hidup sejalan dengan semangat demokrasi, otonomi daerah, dan keterbukaan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

### **2. Peran Pemerintah Melalui Aturan FLPP**

Salah satu program percepatan pengembangan perumahan rakyat adalah melalui program FLPP. Program FLPP dibuat oleh Kemenpera dalam rangka memberikan kemudahan-kemudahan kredit rumah bagi masyarakat kurang mampu dan kategori perumahannya adalah tipe perumahan sederhana tapak. Program FLPP dari pusat ini kemudian harus dilaksanakan di daerah-daerah seluruh Indonesia.

KPR FLPP diberikan bagi MBR, baik berpenghasilan tetap maupun berpenghasilan tidak tetap, yang belum memiliki rumah dengan batas penghasilan pokok tertentu untuk pemilikan rumah dengan spesifikasi yang ditetapkan pemerintah. Beberapa persyaratannya antara lain pertama belum pernah memiliki rumah baik yang perolehannya melalui pembiayaan bersubsidi maupun tidak bersubsidi, kedua penghasilan pokok maksimal Rp3,5 juta untuk rumah tapak dan Rp5,5 juta untuk Rusun, ketiga memiliki NPWP dan SPT atau Surat Pernyataan Penghasilan.

Sedangkan spesifikasi rumah yang diperbolehkan antara lain rumah tapak dengan luas minimal 36 meter persegi dan rumah susun yang luas paling sedikit 21 meter persegi dan tidak melebihi 36 meter persegi. Untuk meningkatkan pasokan rumah sejahtera dapat berasal dari orang perseorangan dan atau badan hukum di bidang perumahan dan kawasan permukiman. Untuk mengatasi minimnya pasokan rumah yang terbatas maka PT dan CV yang membangun rumah bisa memanfaatkan FLPP.

Persyaratan fisik bangunan FLPP diantaranya atap, lantai dan dinding memenuhi persyaratan teknis

keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan, jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air tanah yang layak, utilitas jaringan listrik yang berfungsi, jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi serta saluran atau drainase tertata dengan baik. Beberapa kelonggaran lainnya, kata Sri Hartoyo antara lain, jika PSU belum terpenuhi maka akad KPR dapat diproses dengan syarat keterangan kesediaan PLN untuk menyediakan pasokan listrik atau bukti pembayaran biaya penyambungan listrik dari PLN, badan jalan telah terbentuk dan dilakukan pengerasan, badan saluran atau drainase lingkungan telah tergali dan ada jaminan berupa dana yang ditahan atau bentuk lainnya.

**a) Latar Belakang Kebijakan Fasilitas likuiditas**

Sejak diluncurkannya Fasilitas Likuiditas pada tahun 2010, telah berhasil dibiayai sebanyak 14.000 unit Rumah Sejahtera Tapak, dan 1.600 unit Rumah Sejahtera Susun.

**b) Ketentuan Tentang Harga Rumah, Uang Muka dan Maksimal KPR**

1. Kemampuan daya beli masyarakat masih sangat terbatas dan kenaikan penghasilan/pendapatan setiap tahunnya tidak signifikan dibandingkan dengan laju inflasi per tahun.
2. Keterjangkauan angsuran KPR bersubsidi didiberikan secara terbatas selama masa subsidi (4/10 tahun).
3. Optimalisasi pemanfaatan dana APBN sejalan dengan keterbatasan keuangan Negara.
4. Memerangi rejim sukubunga tinggi melalui penyediaan dan amurah jangka panjang sampai dengan melembaganya Tabungan Perumahan Nasional (TPN).
5. Daya tarik bagi sumber dana lain untuk berperan dalam pembiayaan perumahan (integrasi sumber-sumber pembiayaan).

Tabel 2.1 Ketentuan Tentang Harga Rumah, Uang Muka dan Maksimal KPR

| No | Wilayah  | Maksimal Harga Rumah*) | Minimal Uang Muka    | Maksimal Nilai KPR |
|----|--|------------------------|----------------------|--------------------|
| 1  | <u>Wilayah I:</u><br>- Sumatera<br>- Jawa selain Jabodetabek<br>- Sulawesi | Rp 88.000.000,-        | 10%<br>Harga Rumah   | Rp 79.200.000,-    |
| 2  | <u>Wilayah II:</u><br>- Kalimantan<br>- Maluku<br>- NTB<br>- NTT           | Rp 95.000.000,-        | 10%<br>Harga Rumah   | Rp 85.500.000,-    |
| 3  | <u>Wilayah III:</u><br>- Papua<br>- Papua Barat                            | Rp 145.000.000,-       | 12,5%<br>Harga Rumah | Rp 126.875.000,-   |
| 4  | <u>Wilayah Khusus:</u><br>- Jabodetabek<br>- Batam<br>- Bali               | Rp 95.000.000,-        | 10%<br>Harga Rumah   | Rp 85.500.000,-    |

## 2. Peran DPD REI RIAU dalam Pengembangan Perumahan Rakyat di Kota Pekanbaru

Peran dan fungsi organisasi REI memberikan kontribusi yang nyata pada pembangunan, khususnya di bidang perumahan dan permukiman. Salah satunya dengan menyerahkan *Blueprint* Pengembangan Real estat Nasional kepada pemerintah pusat dan para pemangku kepentingan di bidang perumahan dan permukiman yang berisi pokok-pokok pikiran tentang bagaimana seharusnya mengembangkan sector perumahan rakyat secara optimal. Masalah perizinan dan legalitas, keberlangsungan bisnis property Pekanbaru membutuhkan sebuah sinkronisasi dan koordinasi yang lebih baik lagi antara pihak *developer* dan Pemerintah. Tuntutan profesionalisme fungsi asosiasi jadi poin penting keberlangsungan sector properti di Pekanbaru. Karenanya, laju bisnis property menggantungkan peran aktif DPD REI Pekanbaru.

Dengan demikian, diharapkan sebuah sinkronisasi dan koordinasi yang lebih baik lagi antara pihak *developer* dan Pemerintah. Terutama masalah perizinan dan legalitas. Jika, pemenuhan kebutuhan rumah sehat menjadi pekerjaan pokok yang belum terselesaikan dengan baik. Terlebih adanya RUU pertanahan tentang pembatasan area maksimal serta izin lokasi untuk real estat, bagaimana dengan angka *backlog* yang terus meningkat.

Peran REI selanjutnya adalah membuat *blueprint* atau cetak biru. Cetak biru ini adalah sumbangan pemikiran kepada pemerintah dalam sektor perumahan. *blue print* merupakan konsep dan arah pembangunan perumahan. cetak biru ini nantinya dapat menjadi acuan bersama, baik pemerintah atau pun pelaku perumahan lainnya. Upaya tersebut, dilakukan sebagai bentuk kepedulian REI. Sebab, selama ini, pengembang

berkontribusi besar dalam penyediaan perumahan. Sekitar 70% anggota REI merupakan pengembang rumah sederhana<sup>3</sup>. Isi cetak biru ini, di antaranya cara mengurangi kekurangan ketersediaan rumah atau *backlog*.

Nantinya, akan ada pandangan dari dua sisi, yaitu dari pengembang dan konsumen. Dari sisi pengembang, banyak yang harus dipikirkan, termasuk kelanjutan proyek. Sebab, jika harga rumah tidak sesuai, pengembang akan kesulitan untuk membangun kembali setelah menjual rumahnya. Dengan demikian, hal ini menimbulkan pemikiran bagaimana menciptakan pembangunan berkelanjutan, bukan semata mencari untung.

Di sisi lain, adalah ego masyarakat. Di mana, permintaan yang besar ini harus diakomodasi oleh peran pemerintah. Untuk itu, REI mengusulkan kepada pemerintah untuk meringankan uang muka dan memperpanjang tenor untuk mereka yang berada sedikit di atas masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

## 3. Kesimpulan

Rumah merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia. Rumah sebagai tempat berlindung dan tempat beristirahat yang sangat dibutuhkan oleh manusia selain kebutuhan pokok lainnya seperti makanan, pakaian, dan kebutuhan-kebutuhan pelengkap lainnya. Seiring berkembangnya zaman rumah tidak hanya dipandang sebagai kebutuhan pokok semata tetapi juga simbol dari kesejahteraan. Oleh karena itu rumah tidak hanya menjadi masalah individu saja tetapi juga pemerintah. Pemerintah sebagai lembaga untuk mensejahterakan rakyat secara menyeluruh sesuai amanat undang-undang dalam pelaksanaannya membutuhkan pengembang yaitu swasta. Disinilah sinkronisasi kerja antara pemerintah dan swasta terlihat. Hal ini salah satunya diwujudkan oleh Pemerintah

<sup>3</sup>*Ibid.*

Kota Pekanbaru selaku pemerintah daerah dan REI RIAU sebagai pihak swasta.

REI RIAU merupakan satu asosiasi pengusaha properti yang melakukan pengembangan pembangunan perumahan di wilayah Riau khususnya di kota Pekanbaru. Pekanbaru sebagai ibu kota provinsi menjadi sasaran pembangunan perumahan utama karena lokasi yang strategis sebagai ibu kota, pusat ekonomi, pendidikan, dll. Hal ini mengakibatkan permintaan perumahan selalu meningkat

setiap tahunnya. Meskipun permintaan perumahan selalu meningkat tetapi ketersediaan lahan menjadi kendala tersendiri bagi REI untuk melakukan ekspansi pembangunan oleh karena itu REI kini mulai merambah ke kabupaten lain. Tidak hanya berfokus di kota Pekanbaru saja.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan kendala yang dihadapi dan pemecahannya adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.1 Kendala dan pemecahan masalah**

| NO | BOTTLENECK  | DEBOTTLENECKING   |
|----|---|---|
| 1. | KPR BERSUBSIDI TERKENDALA KETERSEDIAAN DANA MURAH JANGKA PANJANG  | PELEMBAGAAN FASILITAS LIKUIDITAS YANG MAMPU MENJAMIN PASOKAN DANA MURAH JANGKA PANJANG UNTUK Mendukung PENERBITAN KPR BERSUBSIDI.   |
| 2. | SUBSIDI BUNGA DENGAN MASA SUBSIDI TERBATAS PADA KPR BERSUBSIDI TIDAK SEPENUHNYA TERJANGKAU.                   | KPR BERSUBSIDI DENGAN DUKUNGAN FASILITAS LIKUIDITAS MENJAMIN ANGSURAN TERJANGKAU DAN TETAP SELAMA TENOR.  |
| 3. | KETERSEDIAAN LAHAN DI PERKOTAAN LANGKA DAN MAHAL  | - PEMBANGUNAN HUNIAN VERTIKAL (RUMAH SUSUN)<br>- MENDORONG DAN FASILITASI PEMBANGUNAN LINGKUNGAN HUNIAN BERIMBANG<br>- PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR<br>- KONSOLIDASI TANAH UNTUK PERUMAHAN MBR   |
| 4. | KETERJANGKAUAN MBR TERHAMBAT PPN, PPH, DAN BPHTB  | PERCEPATAN REVISI:<br>(1) PP DAN PMK TERKAIT PEMBERIAN INSENTIF BEBAS PPN KEPADA KELOMPOK SASARAN DAN INSENTIF PPH FINAL KEPADA PENGEMBANG<br>(2) PERDA TENTANG PEMBERIAN INSENTIF BPHTB KEPADA KELOMPOK SASARAN                              |
| 5. | PENERBITAN IJIN PEMBANGUNAN PERUMAHAN TIDAK EFISIEN, LAMA DAN MAHAL   | MELENGKAPI PERIZINAN SATU ATAP DENGAN PENETAPAN ATAS WAKTU DAN BIAYA PEMENUHAN SYARAT PERIZINAN   |
| 6. | DUKUNGAN PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS (PSU) KAWASAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN MASIH SANGAT KURANG | - PENGANGGARAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BERUPA PSU KAWASAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN UNTUK MBR MELENGKAPI PSU KAWASAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN YANG DILAKSANAKAN MELALUI APBN KEMENPERA<br>- MENDORONG PARTISIPASI PEMDA DALAM PENYEDIAAN PSU |
| 7. | PENYEDIAAN HUNIAN LA-YAK HUNI DAN PEMBERIAN JAMINAN KEPASTIAN BERMUKIM KEPADA MBR                             | PERLUASAN CAKUPAN PNPB MANDIRI PERKIM MELALUI:<br>- SERTIPIKASI TANAH MILIK MBR<br>- KONSOLIDASI TANAH  |
| 8. | PEMENUHAN KEBUTUHAN RUMAH UNTUK PNS DAN TNI/POLRI   | - REVISI KEPPRES 14/1993 TTG TAPERUM-PNS<br>- PELEMBAGAAN TABUNGAN PERUMAHAN NASIONAL   |

Sumber: SekretariatKementrianPerumahan Rakyat

FLPP esensinya adalah fasilitas likuiditas agar masyarakat bisa menadapatkan suku bunga tetap dengan tenor yang panjang. Sedangkan tujuannya adalah memberikan kepastian kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk bisa mendapat rumah.

Salah satu visi kota Pekanbaru yaitu menjadikan Pekanbaru sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa, menggambarkan keadaan masyarakat Kota Pekanbaru yang diinginkan dalam decade 20 tahun kedepan Pemerintah Kota Pekanbaru dengan dukungan masyarakatnya yang dinamis akan selalu berusaha semaksimal mungkin untuk dapat mewujudkan Kota

Pekanbaru menjadi pusat perdagangan dan jasa di kawasan Sumatera.

Dengan demikian, peran pemerintah dan swasta dalam menciptakan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi merupakan dua hal yang sangat dibutuhkan bagi kebesaran dan keberhasilan bangsa ini. Tidak dapat kita pungkiri bahwa sistem ekonomi negara ini bukan lagi sistem yang terpusat melainkan adalah sistem yang lebih terbuka. Hal ini lebih memungkinkan bagi swasta untuk menguasai sektor ekonomi secara positif yaitu sebagai katalisator pembangunan ekonomi.

## REFERENSI

### Buku:

- Burhan Bungin. 2011. *Metodologi penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke arah Ragam Variasi Kontemporer*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Cipto Junaedy. 2009. *Strategi Membeli Banyak Properti Tanpa Uang Tanpa KPR Nggak Perlu Nunggu Hingga Harga Miring*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Hadi Sabari Yunus. 2005. *Manajemen Kota Perspektif Spasial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Khan, Echsanullah M. 2011. *26 Rahasia Jadi Developer Properti Modal Dengkul*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Muhlis Madani. 2011. *Dimensi Interaksi Aktor Dalam Proses Perumusan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: GRAHA ILMU.
- Purwo Santoso. 2004. *Menembus Ortodoksi Kajian Kebijakan Publik*. Yogyakarta: FISIPOL UGM.
- Riant Nugroho. 2004. *Kebijakan Publik Formulasi Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- R. Serfianto, dkk. 2013. *Buku Pintar Investasi Properti*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Siahaan, P. Marihat. 2006. *Bea Perolehan Atas Tanah Dan Bangunan Teori dan Praktik Edisi Revisi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Yunus Rukmana. 2012. *Strategi membangun bisnis developer property*. UFUK Press. Jakarta.

### Jurnal:

M. Ryaas Rasyid. Otonomi Daerah: Latar Belakang dan Masa Depan. *Jurnal Ilmu Politik*. Vol. 18 September 2002.

Dian Hermawan. Proses Konsultasi Publik dalam Penyusunan Kebijakan Daerah. *Jurnal Ilmu Sosial Alternatif*. Vol 10 No. 2 Desember 2009.

Hartono. Pelayanan Badan Keswadayaan Masyarakat Menjangkau Masyarakat Lapisan Bawah. *Jurnal Ilmu Sosial Alternatif*. Vol 10 No. 2 Desember 2009.

<http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/08/konsep-strategi-definisi-perumusan.html>

### Undang-undang:

Peraturan Menteri Nomor 13/2012 dan 14/2012 Tentang Aturan penyaluran FLPP untuk rumah tapak atau rumah susun.

### Tabloid:

Tabloid Realestat Indonesia” Kebijakan Perumahan Rakyat Kehilangan Arah.” Vol. 6. Edisi 3, 2012.

Tabloid Realestat Indonesia, “RUU Tabungan Perumahan Mulai di Bahas”. Vol. 7. Edisi 3, 2013.

Tabloid Realestat Indonesia, “Pengembang Lirik Kawasan Hunian Khusus Lansia”. Vol. 7. Edisi 2, 2013.

Tabloid Realestat Indonesia, “Semester 1-2012 Sektor Properti Tumbuh di atas 15%”. Vol. 6. Edisi 7, 2012.

Tabloid Realestat Indonesia, “Menggagas Penyaluran KPR di Sektor Informal”. Vol. 7. Edisi 4, 2013.

**Websites:**

<http://kemenpera.go.id/?op=news&act=detaildata&id=1523>

<http://www.rumah123.com/detil-berita-properti-1250-rei-mantapkan-langkah-di-usia-40-id.html>

<http://nasional.sindonews.com/read/2013/07/05/34/757838/kemenpera-kaji-kenaikan-harga-rumah-sederhana>